

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa perubahan identitas kelompok Abu Sayyaf oleh pemerintah Filipina bukan hanya soal anggaran militer ataupun keamanan, melainkan juga didorong dengan ‘ide’ bahwa Filipina memaknai relasinya bukan sebagai “musuh” tetapi sebagai “warga negara” yang harus dipulihkan. Pemerintah Filipina disini dapat diibaratkan sebagai ‘orang tua yang harus mengasuh dan mengayomi anak nakal’ yang kemudian turut membentuk ulang orientasi kebijakan negara, dari *hard approach* menuju ke penguatan *soft approach*. Hal ini dilegitimasi dengan adanya pengadopsian rencana aksi nasional atau NAP-P/CVE melalui Anti Terrorism Resolution No. 38 Tahun 2019. Pemerintah menggeser fokus kebijakan ke arah respon yang preventif dan restoratif, salah satunya adalah dengan menekankan reintegrasi mantan militan ASG yang berisikan penguatan institusi lokal, penyediaan layanan dasar hidup, dukungan psikososial, bantuan hukum, dan pemberdayaan ekonomi.

Implementasi program reintegrasi dalam kerangka NAP-P/CVE memperlihatkan keselarasan dengan konsep *Disarmament, Demobilization, and Reintegration* (DDR). Pengadopsian NAP-P/CVE tidak hanya mencerminkan perubahan instrumen kebijakan, tetapi juga menunjukkan perubahan pemaknaan atau cara negara memahami aktor ancaman itu sendiri. Indikator spesifik dari adanya keberhasilan program reintegrasi mantan militan ASG di Mindanao akan tercermin dalam situasi sebelum dan sesudah adanya program. Salah satunya yang

dapat dilihat adalah tren menurunnya angka insiden kekerasan oleh ASG setelah menyerah kepada negara. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi NAP-P/CVE melalui program reintegrasi telah membuka adanya ruang yang luas terhadap strategi *soft approach* untuk transisi relasi yang lebih kooperatif.

4.2 Saran

Proses reintegrasi mantan militan ASG sebagai salah satu implementasi strategi kontra-terorisme Filipina menunjukkan bagaimana kebijakan keamanan tidak lagi semata berorientasi pada penanggulangan ancaman bersenjata, tetapi juga pada upaya rekonstruksi relasi sosial pasca konflik. Fokus kajian yang hanya ada pada pergeseran konstruksi kebijakan kontra-terorisme Filipina melalui kerangka NAP-P/CVE dan menitikberatkan pada perubahan pemaknaan identitas terhadap kelompok Abu Sayyaf dalam proses reintegrasi di Mindanao, menjadi pembatas analisis terhadap dinamika kelompok ekstremis lainnya serta implikasi yang lebih luas terhadap kelompok non kombatan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data lapangan dan aktor kunci menyebabkan penelitian ini lebih menekankan pada analisis kebijakan, data institusional, dan data wawancara, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kompleksitas pengalaman masyarakat terdampak konflik sebagai penerima.

Kemudian, bagi pemangku kepentingan, khususnya dalam hal ini adalah Filipina, keberlanjutan program reintegrasi menuntut adanya keberlanjutan. Penguatan komitmen negara agar tidak bergantung secara berlebih pada kontribusi mitra asing, sektor swasta, maupun NGO/CSO lokal disini sangat dibutuhkan. Jika

negara terus bergantung, hal ini berpotensi menciptakan kerentanan implementasi ketika dukungan eksternal tidak lagi tersedia, terutama dalam konteks prioritas anggaran yang masih berorientasi pada strategi pertahanan. Pemerintah perlu memastikan kembali alokasi sumber daya yang lebih seimbang serta memperkuat kapasitas institusi lokal agar program reintegrasi dapat berjalan secara inklusif. Oleh karena itu, dengan mengkaji celah-celah tersebut, studi lanjutan diharapkan dapat berkontribusi dalam perluasan literatur terdahulu mengenai *gender-sensitive*, perlindungan anak-anak terdampak, implikasi terhadap keluarga dari kombatan, serta aspek keberlanjutan program reintegrasi di Filipina, terkhusus Mindanao guna memperkaya pemahaman mengenai keberlanjutan program P/CVE.